

m *Musāwa*

Jurnal Studi Gender dan Islam

**INTREPRETASI KONTEKSTUAL AHMAD SYAFI' MA'ARIF
ATAS PERAN PEREMPUAN DI RUANG PUBLIK DALAM QS. AN-NISA: 34**

Muhammad Alwi HS

**MEWUJUDKAN *GENDER EQUALITY* MELALUI PENGEMBANGAN
INDUSTRI RUMAHAN PEREMPUAN**

Novita Tresiana dan Noverman Duadji

PEREMPUAN DALAM KEPEMIMPINAN AGAMA: PENGALAMAN KRISTEN

Asnath N. Natar

**PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN SAMIN:
PERLINDUNGAN BUDAYA VERSUS HUKUM POSITIF**

Moh Rosyid

**RELASI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DI RUANG DOMESTIK DAN PUBLIK
MENURUT PEMAHAMAN ELIT PESANTREN SALAFIYYAH DI JAMBI**

Yuliatin

Vol. 18, No. 2, Juli 2019

 *Musāwa*
Jurnal Studi Gender dan Islam



Pusat Studi Wanita
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Managing Editor:

Witriani

Editor in Chief:

Marhumah

Editors:

Siti Ruhaini Dzuhayatin, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Alimatul Qibtiyah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Muhammad Alfatih Suryadilaga, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Euis Nurlaelawati, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Mochamad Sodik, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Masnun Tahir, Universitas Islam Negeri Mataram, NTB

Dewi Candraningrum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah

Ummi Sumbulah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, Jawa Timur

Tracy Wright Websters, University of Western Sydney, Australia

Language Editors:

Zusiana Elly Triantini, Fatma Amilia, Muh.Isnanto

TERAKREDITASI:

Nomor: 2/E/KPT/2015, Tanggal 1 Desember 2015

Alamat Penerbit/ Redaksi: Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp./ Fax. 0274-550779

Email: pswsuka@yahoo.co.id

Website: psw.uin-suka.ac.id

Musawa adalah Jurnal Studi Gender dan Islam yang fokus pada kajian-kajian gender dan anak, baik yang terintegrasi dengan Islam maupun Hak Asasi Manusia. Diterbitkan pertama kali Maret 2002 oleh Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta bekerjasama dengan Royal Danish Embassy Jakarta. Mulai tahun 2008 terbit dua kali dalam setahun yaitu bulan Januari dan Juli. Mulai tanggal 1 Desember 2015 Jurnal Musawa mendapatkan Akreditasi Nasional Kemristekdikti dengan Nomor: 2/E/KPT/2015

Redaksi menerima tulisan dengan tema Gender, Islam, dan HAM berupa hasil penelitian yang belum pernah dipublikasikan atau diterbitkan di media lain. Artikel ditulis dalam 6.000 – 10.000 kata sesuai dengan gaya selingkung Musawa yang dapat dilihat di halaman belakang. Naskah dikirimkan melalui *Open Journal System* (OJS) Musawa melalui alamat : <http://ejournal.uin-suka.ac.id/musawa>. Editor berhak melakukan penilaian tentang kelayakan suatu artikel baik dari segi isi, informasi, maupun penulisan.

DAFTAR ISI

INTREPRETASI KONTEKSTUAL AHMAD SYAFI'I MA'ARIF ATAS PERAN PEREMPUAN DI RUANG PUBLIK DALAM QS. AN-NISA: 34 <i>Muhammad Alwi HS</i>	105
MEWUJUDKAN <i>GENDER EQUALITY</i> MELALUI PENGEMBANGAN INDUSTRI RUMAHAN PEREMPUAN <i>Novita Tresiana dan Noverman Duadji</i>	119
PEREMPUAN DALAM KEPEMIMPINAN AGAMA: PENGALAMAN KRISTEN <i>Asnath N. Natar</i>	133
PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN SAMIN: PERLINDUNGAN BUDAYA VERSUS HUKUM POSITIF <i>Moh Rosyid</i>	149
RELASI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DI RUANG DOMESTIK DAN PUBLIK MENURUT PEMAHAMAN ELIT PESANTREN SALAFIYYAH DI JAMBI <i>Yuliatin</i>	161
VALIDASI MODUL KESETARAN PERAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN UNTUK MENCAPAI KESEIMBANGAN KERJA-KELUARGA <i>Arri Handayani , Padmi Dhyah Yulianti, dan Primaningrum Dian M</i>	173
IMPLEMENTASI <i>UQUBAT</i> CAMBUK TERHADAP WANITA HAMIL (PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI BANDA ACEH DAN KEJAKSAAN ACEH BESAR) <i>Dikha Savana, Mohd. Din, dan Ali Abu Bakar</i>	183

MEWUJUDKAN GENDER EQUALITY MELALUI PENGEMBANGAN INDUSTRI RUMAHAN PEREMPUAN

Novita Tresiana dan Noverman Duadji

*Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Lampung
novitatresiana@yahoo.co.id dan novermanduadji@yahoo.co.id*

Abstrak

Artikel ini fokus pada kebijakan industri rumahan guna mewujudkan produktivitas ekonomi perempuan pelaku industri rumahan dan model ideal ketercapaian gender equality perempuan bidang ekonomi. Dalam hal ini perlu kebijakan baru dalam peningkatan produktivitas ekonomi perempuan sebagai bentuk demokrasi ekonomi dan keadilan gender (gender equality). Metode survei dan analisis kebijakan digunakan untuk pemetaan dan elaborasi potensi, peluang, tantangan hambatan dan kelemahan sebagai landasan rekomendasi model dan desain kebijakan. Tulisan ini menunjukkan kebijakan industri rumahan mampu mengembangkan potensi diri perempuan sehingga memungkinkan mereka memanfaatkan kesempatan yang sama dalam pembangunan. Rancangan model kebijakan rintisan kluster dengan melibatkan peran triple helix merupakan model ideal untuk mengembangkan industri rumahan dan ketercapaian gender equality. Tipologi kluster yang belum dewasa (rintisan) memerlukan keterlibatan peran triple helix dalam hal ini bukan saja pemerintah daerah, tetapi perguruan tinggi dan bisnis. Peran triple helix difokuskan pada penguatan kebijakan lokal, sarana prasarana, pembangunan kapasitas masyarakat dan pengembangan inovasi produk, dan pemasaran.

Kata Kunci: gender, IR, kluster, *triple helix*

Abstract

This article focuses on the policies of the home industry in order to realize the economic productivity of women in the home industry and the ideal model for the achievement of gender equality in the economy. In this case, new policies are needed to increase women's economic productivity as a form of economic democracy and gender equality. The survey and policy analysis method is used for mapping and elaborating the potentials, opportunities, challenges and constraints as a basis for recommending models and policy designs. This paper shows that home industry policies are able to develop women's potential to enable them to take advantage of the same opportunities in development. The design of a cluster pilot policy model which involves the role of the triple helix is an ideal model for developing a home industry and achieving gender equality. The typology of immature clusters (pioneering) requires the involvement of the role of the triple helix, not only the local government, but also universities and business. The role of the triple helix is focused on strengthening local policies, infrastructure, community capacity building and product innovation development, and marketing.

Keywords: gender, home industry, cluster, *triple helix*

Pendahuluan

Strategi penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu tantangan mendesak bagi Kabupaten Lampung Selatan. Profil Gender Propinsi Lampung (2019) menyebutkan angka kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan sebesar 15,16% jauh di atas angka kemiskinan Propinsi Lampung (13,0%) menduduki peringkat ketujuh termiskin dari 15 Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi Lampung. Untuk gambaran jumlah penduduk terdapat 1.269.262 juta jiwa dengan prosentase laki-laki sebesar 51,3%, sedangkan perempuan sebesar 48,7%. Walaupun jumlahnya hampir seimbang, namun kualitas hidup perempuan masih lebih rendah, salah satunya terlihat dari proporsi tenaga kerja perempuan di sektor informal sebesar 64,18 % dan sektor formal hanya 35,82%. Tresiana dan Duadji (2019)¹ menjelaskan tingginya keterlibatan perempuan dalam sektor informal menggambarkan, pertama, keterbatasan akses perempuan untuk masuk ke sektor formal walaupun kebijakan kesetaraan gender sudah dijalankan; kedua, pilihan perempuan ke sektor informal, dengan pertimbangan ada kemudahan, fleksibilitas kerja di sektor informal yang tidak diperoleh di sektor formal. Hal ini semakin tampak nyata dalam bidang usaha mikro dan sejenisnya, lebih dari 2.399 pelaku usaha mikro dan super mikro (industri rumahan) di Lampung Selatan adalah perempuan. Namun saat ini kondisi mereka masih termarginal secara ekonomi.

Artikel ini berangkat dari marginalisasi perempuan dalam bidang ekonomi sebagai potret bias gender yang ada di masyarakat, bahwa peran perempuan dalam ekonomi hanyalah pelengkap, pencari nafkah tambahan. Untuk itu diperlukan kebijakan baru dalam peningkatan

produktivitas ekonomi perempuan sebagai upaya mewujudkan demokrasi ekonomi dan keadilan gender (*gender equality*). Pemarginalan ekonomi perempuan dalam perspektif kebijakan bukan saja telah mengabaikan kontribusi perempuan, memosisikan sebagai beban pembangunan, namun yang utama telah mengabaikan prinsip demokrasi ekonomi yang kontradiktif dengan *good governance*.

Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi, tahun 2014, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan mengeluarkan Kebijakan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP), yang kemudian di tahun 2016 diaplikasikan dalam bentuk kebijakan dan program Industri Rumahan. Melalui regulasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor. 2 Tahun 2016, pasal 2 dinyatakan bahwa Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan perempuan. Hal ini bertujuan untuk melaksanakan pembangunan industri rumahan yang terkoordinasi, efektif, dan efisien agar bisa bertransformasi menjadi usaha kecil dan dapat menjadi sumber penghasilan dan peningkatan pendapatan, ketahanan keluarga serta kehidupan berkelanjutan.

Laporan Survei KPPPA RI pada tahun 2016 menyebutkan identitas dan karakter Industri Rumahan (IR) adalah : termasuk kelompok usaha super mikro dan mikro yang bergerak di sektor informal. berjumlah lebih dari 70%, dominan dipedesaan, dan umumnya masih belum stabil dan jatuh bangun, didominasi kelompok perempuan, serta memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas hidup anak, perempuan dan keluarganya. Survei di atas, nampaknya paralel dengan penelitian yang dilakukan Anwar dan Dwi Angga²

¹Novita Tresiana dan Noverman Duadji, "Model Klaster Industri Rumahan dalam Mewujudkan Gender Equality di Kabupaten Lampung Selatan, Laporan kemajuan Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi, (2019),1.

²Zainal Anwar dan Rajif Dwi Angga, "Perempuan Aset Desa dan Sumber Kehidupan: Studi Kasus Desa Gadungan Blitar Jawa Timur". *Jurnal Musawa 1*, (2017), 1.

yang menggambarkan sosok perempuan sebagai bagian dari masyarakat, yang mampu mendorong ekonomi melalui organisasi dan pemanfaatan aset desa. Penelitian yang dilakukan Ardhanariswan dan Marwah³ semakin memperkuat analisis ini melalui penggambaran pelaku usaha perempuan pengrajin batik Gumelem, di Kabupaten Banjar negara sebagai pekerja informal yang tidak stabil, disisi lain berperan sebagai pencari nafkah utama di keluarga.

Kebijakan Industri Rumahan (KIR) adalah kebijakan alternatif dan afirmatif, menekankan lokalitas, baik kelembagaan, komunitas, lingkungan, kultur, ada pemihakan dan pemberdayaan yang dipahami sebagai proses transformasi hubungan sosial, ekonomi, dan perlindungan usaha perempuan. Karakter kebijakan berciri *transformative* dan *transactive planning*, *bottom up*, *community empowerment* dan *participative*. Dalam kerangka kebijakan pemberdayaan alternatif ini, maka KIR fokus pada proses pembelajaran, penguatan kapasitas perempuan, yang mencakup penguatan kapasitas individu, kapasitas entitas dan kapasitas jejaring, serta kemandirian sosial dan ekonomi. Salah satu strategi pengembangan industri rumahan adalah dengan model klaster (*cluster*). Klaster merupakan pengembangan sistem usaha-usaha sejenis, yang dilakukan perempuan dalam satu kawasan, dan berbentuk kelompok, sehingga tercipta kolaborasi, sinergitas, persatuan yang akan menjadi kekuatan. Pengembangan model klaster, membutuhkan metode percepatan transformasi untuk tercapainya kesetaraan gender dan pemberdayaan seluruh perempuan. Inovasi *The Triple Helix* adalah basis penyelesaian masalah, payung yang menghubungkan antara

universitas (*Intellectuals*), bisnis/industri (*Business*), dan Pemerintah (*Government*) dalam kerangka pemberdayaan ekonomi. *The triple helix* diharapkan dapat menjadi penggerak lahirnya kreativitas, ide, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang vital bagi berkembangnya industri rumahan perempuan.⁴

Fokus artikel ditujukan untuk melihat apakah kebijakan industri rumahan yang telah dijalankan merupakan kebijakan afirmatif yang tepat untuk mewujudkan produktivitas ekonomi perempuan pelaku industri rumahan dan bagaimana model ideal ketercapaian kesetaraan gender bidang ekonomi. Ruang lingkup pembahasan meliputi pemetaan industri rumahan dan model pengembangan industri rumahan sebagai kebijakan alternatif dalam mewujudkan kesetaraan gender bidang ekonomi.

Metode Penelitian

Pemetaan industri rumahan dan pemetaan elemen-elemen klaster menjadi fokus tulisan ini. Industri rumahan mengacu pada Permen PPPA Nomor 2 Tahun 2016, adalah suatu sistem produksi, yang berarti ada produk yang dihasilkan melalui proses pembentukan nilai tambah dari bahan baku tertentu, yang dilakukan di rumah perorangan dan bukan di suatu lokasi khusus (pabrik). Klasifikasi IR pada kelompok Usaha Mikro (Micro Enterprises), berada pada sektor informal. Tiga kategori IR disusun berdasarkan tingkat keberlanjutan usaha, modal, teknologi proses produksi yang digunakan, jumlah tenaga kerja dan sistem penjualan produknya, yaitu IR Pemula, IR Berkembang dan IR Maju. Sedangkan pengukuran tipologi klaster mengacu pada Bappenas (2016) yang mengklasifikasikan klaster sebagai sentra, klaster pemula, klaster dinamis, klaster maju. Elemen perkembangan

³Riris Ardhanariswari dan Sofa Marwah, "Analisis Gender Terhadap Peran Perempuan Pengrajin Batik Gumelem Dalam Pelestarian Warisan Budaya dan Pemenuhan Ekonomi Keluarga," *Jurnal Musawa* 2, (2017), 1.

⁴Henry Etzkowitz, *The Triple Helix : University, Industry, Government Innovation in Action*, (New York and London: Routledge Taylor & Francis Group, 2008). 19

klaster yang menjadi rujukan dikelompokkan menjadi 3 faktor, yaitu: kelembagaan, kinerja usaha, konektivitas dan peran pemerintah

Populasi/sampel penelitian didasarkan pada pendekatan partisipan (*purposive sampling*) dan terdiri dari 101 pekerja perempuan rumahan di 2 desa. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Canti dan Way Muli Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan, dekat dengan obyek wisata. Karakter kedua desa adalah: wilayah yang angka kemiskinan tinggi, wilayah yang memiliki banyak pelaku IR, wilayah yang merupakan basis/kantong TKI/TKW, wilayah yang memiliki gizi buruk, AKI dan AKB tinggi, wilayah yang minim mendapatkan kegiatan pemberdayaan dan daerah sentra produksi.⁵

Metode survei digunakan untuk pemetaan industri rumahan dan pengukuran elemen klaster industri rumahan. Analisis kebijakan digunakan untuk mengelaborasi potensi, peluang, tantangan hambatan dan kelemahan. Kesemuanya menjadi analisis dalam rekomendasi model dan desain kebijakan. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah melalui wawancara dan diskusi kelompok terarah. Petugas survei diberi pelatihan tentang konsep-konsep kunci yang berkaitan dengan survei. Untuk menentukan apakah orang yang diidentifikasi memang pelaku usaha rumahan ataukah bukan, petugas survei mengajukan beberapa pertanyaan penyaringan terkait dengan pekerjaan responden untuk memverifikasi status mereka sebelum memulai wawancara.

Instrumen utama yang digunakan untuk penelitian ini adalah kuesioner yang dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA RI) dan Bappenas

(2006) yang terdiri dari 6 dimensi, yaitu: 1) dimensi identitas responden, 2) dimensi identifikasi industri rumahan, 3) dimensi kelembagaan, 4) dimensi kinerja usaha, 5) dimensi konektivitas. Diskusi kelompok terarah juga dilaksanakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pengalaman dan persepsi pekerja berbasis rumahan. Luaran penelitian ini diharapkan dapat terpetakan industri rumahan, klasifikasi dalam kategori industri rumahan, tipologi klaster serta peran pemerintah daerah, bisnis dan perguruan tinggi.

Pemetaan Industri Rumahan (IR) di Desa Sampel

Kabupaten Lampung Selatan merupakan daerah di Ujung Selatan pulau Sumatera yang menjadi pintu gerbang masuknya arus orang, barang dan jasa ke provinsi-provinsi lain di pulau Sumatera maupun Provinsi Lampung secara khusus. Ada 101 pelaku usaha super mikro dan mikro perempuan di dua sampel penelitian. Terdeskripsi 100 persen pelaku IR yang dikembangkan di dua desa yang disurvei tersebut adalah di bidang pangan. Hal ini terkait dengan ketersediaan sumber daya alam atau bahan baku. Jenis usaha yang dikembangkan adalah keripik pisang dan bakso ikan, relatif dominan diproduksi. Terlihat potensi wilayah yang dapat dikembangkan lebih lanjut atas ketersediaan bahan baku yang khas, yaitu ikan dan pisang, seperti pengembangan variasi produk seperti empek-empek, nuget, bakso dan ikan asin, dan lain-lain.

⁵Novita Tresiana dan Noverman Duadji, "Model Klaster Industri Rumahan dalam Mewujudkan Gender Equality di Kabupaten Lampung Selatan, *Laporan kemajuan Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi*, (2019), 41.

Tabel 1. Kondisi Pelaku IR di Desa Sampel

Uraian	Kategori	Persentase (%)
Jumlah Modal	<5 juta	93,1
Sumber Modal	Sendiri	34,7
Teknologi Produksi	Manual	91,1
Jumlah Tenaga Kerja	1-2 orang	80,2
Cara Penjualan	Langsung/lepas	61,4
Wilayah Pemasaran	Sekitar Desa	69,3
Cara Pembayaran	Non Tunai	74,3
Pengolahan limbah	Buruk	60,4
Pengalaman Pelatihan	Belum pernah	85,1

Sumber: Tresiana dan Duadji (2019)

Tabel 2. Kondisi Keberlanjutan Pelaku IR di Desa Sampel

Uraian	Kategori	Persentase (%)
Kepemilikan izin usaha	Ada	95
Lama usaha	Lebih dari 2 tahun	53,5
Pola produksi	Kontinyu	80,2
Status Tempat Usaha	Milik Sendiri	95
Sarana Transportasi	Baik	84,2
Sarana Komunikasi	Baik	93,1

Sumber: Tresiana dan Duadji (2019)

Berdasarkan kondisi pelaku IR dan keberlanjutannya, tergambar klasifikasi IR di Kabupaten Lampung Selatan didominasi IR 1 (pemula), dengan jumlah modal awal pribadi kurang dari 2 juta, teknologi manual, dengan jumlah tenaga kerja 1-2 orang (terkadang dirinya sendiri), wilayah pemasaran sekitar desa, penjualan lepas, pengolahan limbah buruk, belum tersentuh pelatihan. Tresiana dan duadji ‘menggambarkan bahwa potensi di sekitar pelaku IR di antaranya daerah wisata, kontribusi dan peran serta masyarakat, pelaku usaha, perguruan tinggi, telah banyak kelompok usaha ekonomi produktif maupun usaha simpan pinjam

baik di desa sampel maupun sekitarnya, tersedia sumberdaya ekonomi hasil laut dan tanaman (pisang, sukun). Kekuatan yang dimiliki pelaku usaha adalah: tempat usaha milik sendiri, pola produksi kontinyu, lama usaha lebih dari 2 tahun, tenaga kerja perempuan, pendidikan dominan menengah ke atas, tersedia transportasi. Sedangkan ancaman yang perlu di atasi adalah: bahan baku pendukung dari luar desa, produk produk sejenis dari luar desa dan kemasan.

Model Klaster dalam Pengembangan Industri Rumahan

Gambaran potensi dan kekuatan yang dimiliki industri rumahan di Kabupaten Lampung Selatan memerlukan penguatan inovasi model dan kebijakan klaster industri rumahan dan pelibatan jejaring potensial sebagai *triple helix*. Untuk itu pengukuran posisi perkembangan klaster di

‘Novita Tresiana dan Noverman Duadji,’ Model Klaster Industri Rumahan dalam Mewujudkan Gender Equality di Kabupaten Lampung Selatan, Laporan kemajuan Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi, (2019),39.

Kabupaten Lampung Selatan diperlukan sebagai langkah awal pemerintah daerah mengambil kebijakan penguatan produktivitas perempuan pelaku industri rumahan. Elemen perkembangan klaster, diukur dari kelembagaan, kinerja usaha, konektivitas dan peran pemerintah.

Tabel 3. Bentuk Kelembagaan

No	Kelembagaan Klaster	Jumlah	Prosentase (%)
1	Berbadan hukum koperasi	0	0
2	Paguyuban, gapoktan, forum	10	10%
3	sentra, kelompok-kelompok	91	91%
Jumlah		101	100 %

Sumber: Tresiana dan Duadji,2019

Tabel di atas menggambarkan telah ada sentra, kelompok-kelompok pelaku IR. Sentra kelompok-kelompok adalah bentuk kelembagaan yang paling sederhana di dalam klaster, tidak ada kerjasama ataupun jalinan bisnis (koneksi) yang terjadi antar pelaku usaha yang ada di dalam klaster. Keberadaan mereka hanya karena kondisi geografis yang berada dalam satu lokasi yang berdekatan. Terdapat 91% pelaku usaha yang ada pada tingkatan bentuk kelembagaan sentra. Pada bentuk kelembagaan klaster juga sudah terdapat pembagian peran

yang jelas sesuai dengan kaidah manajemen klaster. Bentuk kelembagaan klaster berupa forum dipandang bisa dilaksanakan dibandingkan dengan bentuk kelembagaan yang lain. Kegiatan juga dilakukan, seperti pertemuan rutin sebagai wadah diskusi untuk menyelesaikan masalah, *market sharing*, akses pada program pemerintah, wadah untuk menggali informasi perkembangan usaha, pelatihan-pelatihan. Kelembagaan yang ada di dalam klaster sangat mendukung perkembangan dan kemajuan usaha pelaku IR.

Tabel 4. Tingkat Keuntungan

Nilai Tambah	Frekuensi	Persentase (%)
Menurun	1	1
Tetap/Stabil	5	4,95
Meningkat	95	94,05
Total	101	100

Sumber: Tresiana dan Duadji,2019

Tingkat Keuntungan yang tinggi menunjukkan biaya produksi yang rendah. Keberlangsungan usaha dalam kelompok kluster akan dapat bertahan ketika dalam wadah klaster kegiatan usaha menjadi efisien, salah satu indikatornya adalah rendahnya biaya atau

tingginya keuntungan yang didapat. Selama 3 tahun terakhir, 94,05% pelaku usaha yang ada di dalam klaster mengalami peningkatan keuntungan, sedangkan 4,95% stabil dan ada 1% yang mengalami penurunan.

Tabel 5. Kerjasama Vertikal&Horizontal

Kerjasama Vertikal&Horizontal	Frekuensi	Persentase (%)
Tidak ada	12	11,88
Ada	89	88,11
Total	101	100

Sumber: Tresiana dan Duadji,2019

Tabel 6. Lembaga Pendukung

Lembaga Pendukung	Frekuensi	Persentase (%)
Pemerintah	50	49,50
Pemerintah, Perguruan Tinggi	40	39,60
Pemerintah,Bisnis	10	9,9
Pemerintah, Bisnis,Perguruan Tinggi	1	1
Total	101	100

Sumber: Tresiana dan Duadji,2019

Kerjasama antar pelaku usaha sudah ada di dalam klaster, yakni sebesar 88,11% dari klaster. Sedangkan yang tidak ada kerjasama sebesar 11,88%. Keterlibatan lembaga pendukung menjadi salah satu indikator dari variabel keterhubungan pelaku usaha dengan pihak luar. Keterlibatan lembaga yang semakin banyak jumlah dan organisasinya menunjukkan konektivitas yang semakin tinggi, sehingga peluang ke arah klaster ideal semakin tinggi. Konektivitas menunjukkan kolaborasi pelaku usaha dalam pengembangan usaha.

Dimensi perkembangan klaster dilihat dari 3 faktor, yaitu: 1) Kelembagaan; merupakan aktivitas pada klaster yang diatur oleh organisasi yang terstruktur dan dapat menjadi roda penggerak dinamikan klaster tersebut; 2) Kinerja usaha; seberapa besar tiap usaha yang ada dalam klaster mendapat keuntungan dan efisiensi dari kegiatan usaha yang terspesialisasi karena klaster yang terbentuk; 3) Konektivitas dan peran pemerintah ; organisasi yang saling terkait dengan beragam jenis hubungan yang berbeda menjadi dasar peran *triple helix*. Berbasis hasil penelitian yang

dilakukan (dalam Tresiana dan Duadji)⁷maka stratifikasi perkembangan klaster di Kabupaten Lampung Selatan belum terklasifikasi klaster yang matang, namun masih merupakan rintisan klaster. Tipologi stratifikasi dan perkembangan klaster di lokasi penelitian, Kabupaten Lampung Selatan diawali dari berupa : Pertama, sentra berawal dari kumpulan para pelaku IR sejenis di kawasan desa-desa yang berdekatan. Peralatan dan teknologi masih tradisional dan belum mempunyai cara kerja yang efisien, serta belum mempunyai kemampuan dalam menggali pasar dan sama sekali tidak ada konektivitas pada kelompok usaha ini. Kedua, *dormant/statis* (anglomerasi usaha). IR sudah mulai usaha yang beraglomerasi akibat keuntungan kolektif dari infrastruktur, pengumpulan pekerjaan, imej pemasaran dan penyediaan input. Adanya pendekatan tempat usaha, masing-masing usaha memiliki komponen produksi, mendorong terjadinya hubungan

⁷Novita Tresiana dan Noverman Duadji,” Model Klaster Industri Rumahan dalam Mewujudkan Gender Equality di Kabupaten Lampung Selatan, Laporan kemajuan Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi, (2019),54.

yang komplementer. Tahapan ini sebagai awal mulai tumbuhnya klaster, karena ada indikasi konektivitas. Sebagai embrio untuk klaster, sejumlah usaha dalam aglomerasi mulai bekerja sama di sekitar kegiatan inti, dan menyadari peluang umum melalui *linkage* mereka. Pemerintah dan pihak lainnya dapat mendukung. Ketiga, *Tumbuh/Growth*. terjadi spesialisasi *supplier* dan pelaku usaha yang menyediakan jasa. Adanya spesialisasi tenaga kerja dan penggunaan fasilitas bersama untuk produksi. Tersedia organisasi pelatihan dan riset berkontribusi dan berkolaborasi yang memberikan informasi dan pengetahuan. Tahapan ini sebagai tahapan menuju kondisi ideal dari klaster. Ketepatan program dan ada atau tidaknya intervensi dari pihak luar akan sangat menentukan ke arah mana klaster ini akan berkembang/menurun. Infrastruktur dan konektivitas telah ada, persaingan usaha yang terjadi di dalam klaster yang akan mewarnai arah perkembangannya. Persaingan usaha yang kondusif/ sehat akan membawa pada keberlangsungan klaster dan perkembangan yang baik.

Analisis penelitian yang dilakukan Tresiana dan Duadji,⁸ tidak menemukan klaster ideal/mature karena jasa layanan penunjang, lembaga penelitian tidak berada pada wilayah kerja klaster. Proses munculnya usaha inti dalam satu lokasi serta usaha penunjang yang dibutuhkan, dan menjalin kerjasama bertujuan untuk mencapai skala ekonomis yang saling menguntungkan. Proses perkembangan ke arah stratifikasi membentuk pola tertentu yang dapat diidentifikasi dari Institutional Linkage yang terbentuk, yang terbentuk dari pola hubungan horisontal, vertikal dan institusi.

Gender Equality dan Pelibatan Triple Helix

⁸Novita Tresiana dan Noverman Duadji, "Model Klaster Industri Rumahan dalam Mewujudkan Gender Equality di Kabupaten Lampung Selatan, Laporan kemajuan Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi", (2019), 55.

dalam Model Klaster Industri Rumahan

Penjabaran optimalisasi, keberdayaan inovasi potensi-potensi sosial budaya untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat, termasuk perempuan memerlukan inovasi model pemberdayaan kapasitas masyarakat, yang berfokus proses pembelajaran, penguatan kapasitas kelompok perempuan. Kelompok perempuan memerlukan penguatan kapasitas individu, entitas dan jejaring, juga kemandirian sosial dan ekonomi. Diperlukan intervensi kebijakan pemberdayaan ekonomi sebagai solusi bukan saja untuk mengentaskan kemiskinan, ekonomi tetapi juga ketercapaian *gender equality*. *Gender equality* menjadi point penting pembangunan yang berkesetaraan dan berkelanjutan, yang mana kondisi, kontribusi dan kemanfaatan pembangunan, dapat dilakukan dan diterima secara setara oleh perempuan dan laki-laki sehingga tercapai keberdayaan ekonomi perempuan.

Pemerintah melalui *leading sector* utamanya, yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (KPPPA RI), mengeluarkan paket Kebijakan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) di Tahun 2014, untuk mendukung kegiatan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi. Selanjutnya, melalui Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2016, dilaksanakan program pembangunan industri rumahan (IR) secara masal, untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan perempuan. Dengan demikian melalui IR akan terwujud *gender equality*, berupa kapasitas dan kualitas kesetaraan gender dalam kegiatan ekonomi rumah tangga dan pembangunan ekonomi yang berperspektif gender.

Fenomena industri rumahan berbasis penelitian, memiliki berbagai masalah baik masalah internal maupun masalah eksternal. Masalah internal yang terjadi meliputi kelembagaan, modal, pemasaran, teknologi,

kinerja usaha, konektivitas dan perlindungan pemerintah. Salah satu strategi untuk pengembangan industri rumahan adalah dengan penerapan model klaster (*cluster*). Klaster Porter⁹ merupakan pengembangan sistem usaha-usaha perseorangan yang dilakukan perempuan sejenis dalam satu kawasan dibentuk berkelompok, sehingga tercipta kolaborasi, sinergitas, persatuan yang akan menjadi kekuatan. Schmitz dan Nadvi¹⁰ melihat ada 3 hal mendasar sebagai ciri-ciri klaster, yaitu: a) *komonalitas*, berupa usaha beroperasi dalam bidang-bidang serupa dengan fokus pasar bersama; b) *konsentrasi*, pengelompokan usaha yang benar-benar melakukan interaksi; c) *konektivitas*, berupa organisasi yang saling terkait/bergantung dengan beragam jenis hubungan yang berbeda. Dalam konteks ini, inovasi Klaster Industri Rumahan (KIR) dibuat untuk mengatasi masalah di lapangan yang meliputi: adanya kecenderungan merubah pembinaan sektor industri lebih tepat sasaran, ditemukannya persaingan antar usaha sejenis, sehingga *bargaining power* terhadap *supplier* dan *buyer* menjadi rendah, hambatan administrasi dan otorisasi dari institusi pengambil kebijakan, serta semakin melemahnya motivasi berusaha pelaku usaha perempuan sebagai dampak rendahnya *power* dalam kepemilikan asset. Luaran/identitas yang akan dibentuk melalui program KIR adalah mandiri secara ekonomi dan sosial. Mandiri secara ekonomi berarti akan tumbuh usaha produktif perempuan, kesadaran wirausaha dan meningkatnya kerjasama bisnis. Dalam hal ini, klaster pun akan menjadi dinamis. Mandiri secara sosial berarti, tumbuhnya kerjasama kolektif, kelembagaan sosial dan tingkat partisipasi sosial, menguatnya pengetahuan dan kesadaran sosial

⁹Porter, M.E, “*Cluster and New Economics of Competition*, *Harvard Business Review*,76(6), (1998), 78

¹⁰Schmitz, H. and Nadvi, K, *Clustering and Industrialization: Introduction*. World Development, 27(9), . (1999).1504

dan berjalannya kehidupan sosial lebih baik (Schmitz).¹¹ Diperlukan jaringan sosial sebagai elemen penting klaster. Jaringan sosial yang padat yang melibatkan banyak orang dalam suatu komunitas bisa mempermudah penyebaran informasi dan meningkatkan solidaritas sosial (Coleman dan Granovetter).¹²

Dalam melakukan intervensi terhadap pembentukan klaster industri rumahan, diperlukan desain yang bisa mempercepat terjadinya produktivitas perempuan. Pelibatan *Triple Helix* (Etzkowits),¹³ menjadi desain penguatan klaster IR dalam ketercapaian *gender equality* dengan melibatkan swasta (bisnis/industry) dan perguruan tinggi (universitas) serta pemerintah daerah dalam pembagian urusan yang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ketiga *helix* tersebut berperan memperkuat klaster melalui kreativitas, ide, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang vital bagi tumbuhnya produktivitas ekonomi perempuan melalui industri rumahan. Dalam *triple helix model*, pemerintah (*government*) berperan dalam memberikan kemudahan perizinan dan penyediaan sarana fisik yang dibutuhkan untuk keberjalanan pelaku industri rumahan (IR). Berbagai penyediaan sarana fisik meliputi jalan, transportasi hingga alat-alat yang dibutuhkan IR. Administrasi keuangan usaha diserahkan sepenuhnya kepada perguruan tinggi (*University*). Berbagai kurikulum berorientasi *entrepreneurship*, riset inovatif multidisiplin, serta lembaga pendidikan dan pelatihan dengan

¹¹Schmitz, H, “Collective Efficiency: Growth Path for Small Scale Industry”,*Journal of development Studies*,31(4), (1995), 533

¹²Coleman, James S. , “*Social Capital in the Creation of Human Capital*”, *The American Journal of Sociology*, Volume 94, (1988), 106 dan Granovetter, Mark., “*Economic Action and Social Structure: the Problem of Embeddedness*”. *American Journal of Sociology*, Volume 91. Isu 3. (1985),488

¹³Henry Etzkowitz, *The Triple Helix : University, Industry, Government Innovation in Action*, (New York and London: Routledge Taylor& Francis Group,2008). 7

berlandaskan akademis diharapkan mampu dicerna dengan baik oleh pelaku usaha.

Pemerintah dan swasta (bisnis/industry) berkolaborasi dalam penyediaan modal, kemudahan memperoleh kredit dan *reservation scheme*. Dalam penyediaan modal, Pemerintah diharapkan dapat memanfaatkan uang *tax payer* untuk pembayaran bunga bagi pelaku usaha kecil yang meminjam di bank. Pemerintah membantu penyediaan modal bagi industri kecil dan menengah (rumahan) sesuai dengan prinsip pembiayaan pembangunan yaitu *utility contractarian* karena memaksimalkan potensi sumber daya yang ada yaitu potensi SDM. Namun Pemerintah juga perlu bekerja sama dengan swasta (bisnis/industry), karena dana yang dimiliki Pemerintah terbatas. Peran swasta sangat besar untuk menumbuhkan IR dalam berbagai peran mulai dari kewirausahaan, *business coaching and mentoring*, skema pembiayaan, pemasaran dan *business matching*. Melalui dana CSRnya mereka dapat memberikan modal kepada masyarakat yang akan mendirikan industri. Sementara itu dalam mengelola *reservation scheme*, Pemerintah bekerja sama dengan swasta dengan harapan ada pihak swasta yang tertarik berinvestasi atau bekerja sama dengan IR.

Rancangan model kebijakan rintisan kluster dengan melibatkan peran *triple helix*, didasari dari temuan variabel dan dimensi perkembangan kluster. Diperlukan strategi *triple helix* dalam mendorong perkembangan kluster pada masing-masing stratifikasi perkembangan kluster. Konsep utama desain model kebijakan adalah spesialisasi /kekhususan kluster industri rumahan (IR) dengan pendekatan *triple helix* yang mengkolaborasikan peran universitas, *Business/industry* dan *Government* (ABG) dalam pengembangan kluster. Dengan demikian tergambar desain strategi yang menyangkut kebijakan Pemerintah yang diperlukan dan infrastruktur yang dibutuhkan, *capacity building* (kapasitas masyarakat) serta

inovasi produk-produk dan pemasaran yang ditawarkan oleh sebuah kluster wilayah.

Selanjutnya dengan hasil arah dan stratifikasi kluster IR, maka pembagian peran *triple helix* dilakukan melalui: *Pertama*, Dimensi Kebijakan Pemerintah Lokal (*Local Public Policy*). Dalam konteks pengembangan kluster IR, hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah kabupaten di antaranya: (a) secara legal formal, keberadaan kluster IR harus tertuang dalam hasil arah dan stratifikasi Rencana Induk Pengembangan IR. Dengan demikian, legal formal keberadaan kluster IR akan kuat secara hukum. Begitu pula dari sisi penganggarannya, merupakan alasan legal untuk memunculkan biaya-biaya pengembangan kluster kedalam pos anggaran (APBD/APBDes). Pemerintah daerah, termasuk Bappeda selaku koordinator mengkoordinasikan program prioritas ini ke dalam program-program OPD yang tidak hanya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saja, akan tetapi juga melibatkan OPD yang lain; (b) yang perlu dilakukan oleh Pemerintah kabupaten terkait dengan kebijakan yakni upaya perlindungan hukum terhadap produk unggulan terutama pada kluster IR dan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) terkait dengan motif dan produk. Wujud perlindungan hukum terhadap produk unggulan kabupaten pada umumnya dan produk unggulan pangan IR pada khususnya adalah berupa Peraturan Daerah/Keputusan Bupati. Peraturan ini akan mengatur tentang produk-produk yang menjadi unggulan terutama di Kabupaten Lampung Selatan serta secara eksplisit dan implisit juga mencantumkan desain dan produk yang menjadi ciri khas Kabupaten Lampung Selatan.

Kedua, Dimensi Pemenuhan Sarana dan Prasarana (*Infrastructure*). Sarana dan prasarana yang dibutuhkan yakni berupa akses jalan raya yang layak, tersedianya “tempat” yang dikaitkan dengan perkembangan desa, misalnya desa wisata,

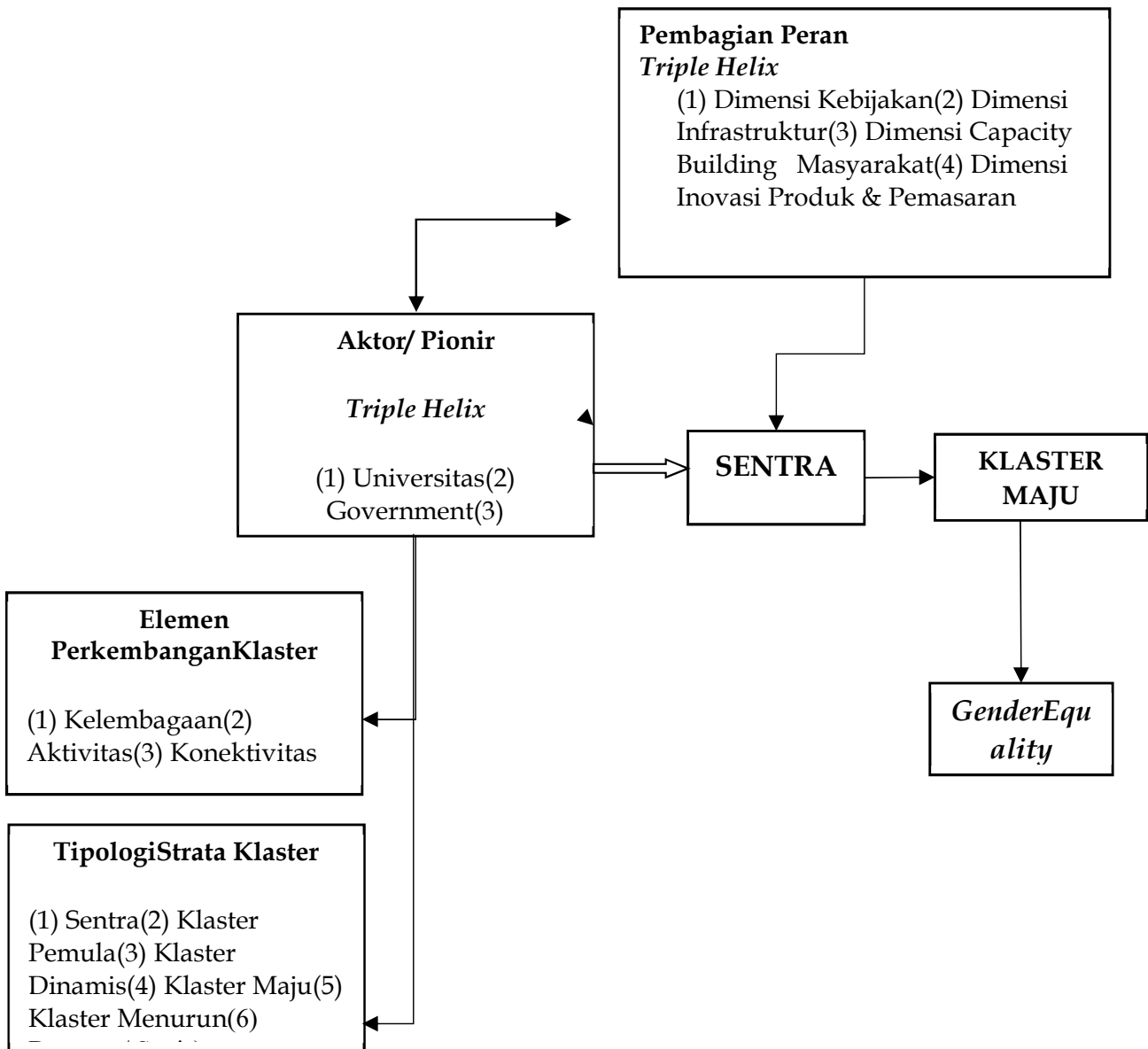
seperti area penjualan, tempat ibadah, rumah makan atau restoran dan tempat penginapan atau *home stay*. Pemerintah harus lebih tanggap kepada

pemenuhan sarana dan prasarana yang dapat mendukung lancarnya perkembangan kluster IR.

Gambar 1.

Model Kebijakan Rintisan Kluster Berbasis *The Triple Helix*

Sumber: Tresiana dan Duadji, 2019



Ketiga, Membangun Kapasitas Masyarakat (Capacity Building). Pengembangan sumber daya masyarakat lokal memegang peranan penting, karena masyarakat lokal adalah subjek dan sekaligus objek dari klaster IR itu sendiri. Pengembangan sumber daya masyarakat lokal dapat dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pendidikan dan latihan. Hal yang penting dalam pembangunan kapasitas yakni penguatan sistem organisasi dan manajemen. Karena fokus dalam penelitian ini adalah klaster/wilayah, maka ‘desa’ adalah *leading sector* dalam penguatan organisasi dan manajemen. Desa harus sebagai penggerak atas penguatan organisasi lokal yang ada di desa seperti halnya paguyuban, pengajian maupun arisan dengan tidak melalaikan fokus utama olah pangan sebagai sentra perhatian. Dari sisi manajemen, masyarakat desa harus ‘berdaya’ dalam hal manajemen, baik manajemen usaha, manajemen pemasaran, maupun manajemen sumberdaya manusia meskipun masih dalam tataran manajemen tingkat dasar.

Keempat, Inovasi Produk, dan Pemasaran (Innovation). Temuan baru yang bisa berupa ide, metode, dan bentuk yang berbeda dari yang sudah ada merupakan sebuah inovasi serta bagian dari pengembangan produk. Inovasi produk tidak harus muncul dari pemilik tetapi bisa jadi muncul dari mana saja. Inovasi produk pada industri rumahan muncul dari pelaku usaha sendiri. Kemungkinan lainnya yaitu adanya inovasi yang muncul dari ide kreativitas maupun imajinasi dari sumber-sumber lain yang menyumbang munculnya ide baru. Adopsi teknologi informasi di klaster industri rumahan dapat dilakukan secara terintegrasi. Integrasi yang dimaksudkan adalah mengajak dan melibatkan desa-desa lain yang ada di sekitar dalam bentuk ekspose pusat informasi dan promosi, sehingga masyarakat luas akan mengetahui potensi produk masing-masing desa serta informasi lainnya. Dengan adanya

akses internet di kawasan klaster IR, terutama di kalangan pelaku IR, akan didapat ide-ide baru. Pemasaran pada saat ini telah mengalami perkembangan. Hal ini karena kegiatan pemasaran tidak hanya melalui pemasaran langsung ke konsumen tapi juga telah menggunakan internet meskipun masih sebagian kecil pelaku IR menggunakan media *online* ini. Para pelaku IR ini umumnya menggunakan media sosial seperti *facebook*. Kemudian pada pelaku juga sudah membentuk forum IR. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, dalam pemasaran juga harus bekerjasama dengan para pengusaha/ pengepul/ pebisnis sedang dan besar, serta para akademisi/ perguruan tinggi/ universitas. Hal ini karena keberadaan para industri/pebisnis dan universitas ini sangat membantu kelancaran pemasaran dari hasil IR. Dengan sinergi antara para pebisnis/ industri, universitas dengan pemerintah tentunya juga akan membantu dan mendorong lancarnya kegiatan yang dilakukan para pelaku IR.

Simpulan

Kebijakan Industri Rumahan yang di inisiasi oleh KPPPA RI melalui regulasi, paket Kebijakan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) di Tahun 2014 dan diimplementasikan melalui Permen PPPA Nomor 2 Tahun 2016 merupakan kebijakan untuk mewujudkan gender equality perempuan di bidang ekonomi yang diarahkan untuk mengembangkan potensi diri perempuan sehingga memungkinkan perempuan memanfaatkan kesempatan yang sama dalam pembangunan.

Rancangan model kebijakan rintisan klaster dengan melibatkan peran triple helix merupakan model ideal untuk mengembangkan industri rumahan dan ketercapaian gender equality. Tipologi klaster yang belum dewasa (rintisan) memerlukan keterlibatan peran *triple helix* dalam hal ini bukan saja pemerintah daerah, tetapi perguruan tinggi dan bisnis. Peran *triple helix*

difokuskan pada penguatan kebijakan lokal, sarana prasarana, pembangunan kapasitas masyarakat dan pengembangan inovasi Produk, dan Pemasaran.

Ucapan Terima Kasih

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang telah memberikan pembiayaan melalui skema Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2019

Daftar Pustaka

- Ardhanariswan, Riris dan Marwah, Sofa., *Analisis Gender Terhadap Peran Perempuan Pengrajin Batik Gumelem Dalam Pelestarian Warisan Budaya dan Pemenuhan Ekonomi Keluarga*,. Jurnal Musawa, Vol. 16 Nomor 2, Juli, 2017, 188-199.
- Anwar, Zainal dan Dwiangga, Rajif. *Perempuan Aset Desa dan Sumber Kehidupan: Studi Kasus Desa Gadungan Blitar Jawa Timur*. Jurnal Musawa, Vol. 16 Nomor 1, Januari, 2017, 81-96.
- Bappenas, Panduan Pembangunan Klaster Industri Untuk Pengembangan Ekonomi Lokal berdaya Saing Tinggi, Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan tertinggal, Bappenas, Jakarta, 2006.
- Coleman, James S. , *Social Capital in the Creation of Human Capital*, The American Journal of Sociology, Volume 94, 1988, 95-120
- Etzkowitz, Henry., *The Triple Helix : University, Industry, Government Innovation in Action*. Routledge Taylor & Francis Group. New York and London, 2008.
- Granovetter, Mark., *Economic Action and Social Structure: the Problem of Embeddedness*. American Journal of Sociology, Volume 91, Issue 3. 1985, 481-510
- KPPPA RI, Laporan Survei Industri Rumahan di Indonesia, Kerjasama IPB dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jakarta, 2016
- Permen PPPA Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Pengembangan Industri Rumahan. Jakarta, 2016.
- Porter, M.E, *Cluster and New Economics of Competition*, Harvard Business Review, 76(6), 1998, 77-87.
- Schmitz, H, *Collective Efficiency: Growth Path for Small Scale Industry*, *Journal of development Studies*, 31(4), 1995, 529-66.
- Schmitz, H. and Nadvi, K, *Clustering and Industrialization: Introduction*. World Development, 27(9), . 1999. 1503-14.
- Tresiana, Novita & Duadji, Noverman., *Model Klaster Industri Rumahan dalam Mewujudkan Gender Equality di Kabupaten Lampung Selatan*, Laporan Kemajuan Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT). Universitas Lampung. 2019.
- Tresiana, Novita dkk, *Profil Gender Propinsi Lampung Tahun 2019*, Kerjasama Puslitbang Wanita, Anak dan Pembangunan LPPM Universitas Lampung dan Pemerintah Daerah Propinsi Lampung, 2019.

STANDAR PENULISAN ARTIKEL

NO	BAGIAN	STANDAR PENULISAN
1.	Judul	1) Ditulis dengan huruf kapital. 2) Dicitak tebal (bold).
2.	Penulis	1) Nama penulis dicitak tebal (bold), tidak dengan huruf besar. 2) Setiap artikel harus dilengkapi dengan biodata penulis, ditulis di bawah nama penulis, dicitak miring (<i>italic</i>) semua.
3.	Heading	Penulisan Sub Judul dengan abjad, sub-sub judul dengan angka. Contoh: A. Pendahuluan B. Sejarah Pondok Pesantren... 1. <i>Lokasi Geografis</i> 2. <i>(dst)</i> .
4.	Abstrak	1) Bagian Abstrak tidak masuk dalam sistematika A, B, C, dst. 2) Tulisan Abstrak (Indonesia) atau Abstract (Inggris) atau ملخص (Arab) dicitak tebal (bold), tidak dengan huruf besar. 3) Panjang abstrak (satu bahasa) tidak boleh lebih dari 1 halaman jurnal.
5.	Body Teks	1) Teks diketik 1,5 spasi, 6.000 – 10.000 kata, dengan ukuran kertas A4. 2) Kutipan langsung yang lebih dari 3 baris diketik 1 spasi. 3) Istilah asing (selain bahasa artikel) dicitak miring (<i>italic</i>). 4) Penulisan transliterasi sesuai dengan pedoman transliterasi jurnal Musāwa.

NO	BAGIAN	STANDAR PENULISAN
6.	Footnote	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penulisan: Pengarang, <i>Judul</i> (Kota: Penerbit, tahun), hlm. Contoh: Ira M. Lapidus, <i>Sejarah Sosial Ummat Islam</i>, terj. Ghufron A. Mas'udi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988), 750. 2) Semua judul buku, dan nama media massa dicetak miring (<i>italic</i>). 3) Judul artikel ditulis dengan tanda kutip (“judul artikel”) dan tidak miring. 4) Tidak menggunakan <i>Op. Cit</i> dan <i>Loc. Cit</i>. 5) Menggunakan <i>Ibid.</i> atau نفسه المرجع (Arab). Dicitak miring (<i>italic</i>). 6) Pengulangan referensi (<i>footnote</i>) ditulis dengan cara: Satu kata dari nama penulis, 1-3 kata judul, nomor halaman. Contoh: Lapidus, <i>Sejarah sosial</i>, 170. 7) Setelah nomor halaman diberi tanda titik. 8) Diketik 1 spasi.
7.	Bibliografi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Setiap artikel harus ada bibliografi dan diletakkan secara terpisah dari halaman body-teks. 2) Kata DAFTAR PUSTAKA (Indonesia), REFERENCES (Inggris), atau مصدر (Arab) ditulis dengan huruf besar dan cetak tebal (bold). 3) Contoh penulisan: Lapidus, Ira M., <i>Sejarah Sosial Ummat Islam</i>, terj. Ghufron A.M., Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988. 4) Diurutkan sesuai dengan urutan alfabet.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam tulisan berbahasa Inggris pada Jurnal *Musāwa* ini adalah literasi model L.C. (*Library of Congress*). Untuk tulisan berbahasa Indonesia, memakai model L.C. dengan beberapa modifikasi.

A. Transliterasi Model L.C.

ح = ḥ	ج = j	ث = th	ت = t	ب = b	ا = -
س = s	ز = z	ر = r	ذ = dh	د = d	خ = kh
ع = ‘	ظ = ḏ	ط = ṭ	ض = ḏ	ص = ṣ	ش = sh
م = m	ل = l	ك = k	ق = q	ف = f	غ = gh
	ي = y	ء = ‘	ه = h	و = w	ن = n

Pendek a = i = u =
 Panjang ā = ī = إي ū = أو
 Diftong ay = إي aw = أو

Panjang dengan *tashdid* : iyy = إي ; uww = أو

Ta’marbūtah ditransliterasikan dengan “h” seperti *ahliyyah* = أهلية atau tanpa “h”, seperti *kulliyya* = كلية ; dengan “t” dalam sebuah frasa (*contract phrase*), misalnya *surat al-Ma’idah* sebagaimana bacaannya dan dicetak miring. Contoh, *dhālika-lkitābu la rayba fih* bukan *dhālika al-kitāb la rayb fih*, *yā ayyu-hannās* bukan *yā ayyuha al-nās*, dan seterusnya.

B. Modifikasi (Untuk tulisan Berbahasa Indonesia)

1. Nama orang ditulis biasa dan diindonesiakan tanpa transliterasi. Contoh: As-Syafi’i bukan al-Syāfi’i, dicetak biasa, bukan *italic*.
2. Nama kota sama dengan no. 1. Contoh, Madinah bukan Madīnah; Miṣra menjadi Mesir, Qāhirah menjadi Kairo, Baghdād menjadi Baghdad, dan lain-lain.
3. Istilah asing yang belum masuk ke dalam Bahasa Indonesia, ditulis seperti aslinya dan dicetak miring (*italic*), bukan garis bawah (*underline*). Contoh: ...*al-qawā’id al-fiqhiyyah*; *Isyrāqiyyah*; *‘urwah al-wusqā*, dan lain sebagainya. Sedangkan istilah asing yang sudah populer dan masuk ke dalam Bahasa Indonesia, ditulis biasa, tanpa transliterasi. Contoh: Al-Qur’an bukan Al-Qur’ān; Al-Hadis bukan al-Hadīth; Iluminatif bukan illuminatif, perenial bukan perennial, dll.
4. Judul buku ditulis seperti aslinya dan dicetak miring. Huruf pertama pada awal kata dari judul buku tersebut menggunakan huruf kapital, kecuali *al-* yang ada di tengah. Contoh: *Ihyā ‘Ulūm al-Dīn*.

ISSN: 1412-3460



1 4 1 2 3 4 6 7